



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS BULETIN

MINGGU KE-

5

APRIL 2025



AUDIENSI BERSAMA
PEMKAB KOTABARU



PENYUSUNAN RENSTRA
2025-2029



BINCANG SANTA
KEKAYAAN INTELEKTUAL

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Fauzie Ariady Raih Jadi Peserta Terbaik ke-2 dalam Pelatihan SPIP Terintegrasi Bersama Tim Kanwil Kemenkum Kalsel



Semarang, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) telah mengikuti Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum Jawa Tengah berkolaborasi dengan Pusdiklat Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang telah berlangsung selama enam hari ini digelar di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah dalam menerapkan SPIP yang efektif, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan di berbagai instansi.

Dalam laporannya, Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif mereka selama pelatihan. Pada kesempatan ini pula Kepala perwakilan BPKP Prov Jateng, Tri Handoyo dalam sambutannya menekankan pentingnya penerapan SPIP secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

“Pelatihan ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membangun komitmen kita bersama dalam memperbaiki sistem pengendalian di setiap unit kerja,” ujar Tri Handoyo.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi dari narasumber berpengalaman dari Pusdiklat Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, Fauzie Ariady menjadi peserta terbaik ke-2 pada pelatihan ini bersama Muhammad Riza, Aditya Maulana Sunarko dan Kalveryanus Tamur yang juga menyelesaikan pelatihan dengan hasil yang memuaskan.



Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi, Tekankan Kekompakan dan Inovasi Pelayanan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar apel pagi rutin pada Senin (28/04/2025) di halaman kantor wilayah. Apel ini dipimpin oleh Selamat Riyadi, Analis SDM Muda, serta Bahjatul Mardhiah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Bahjatul Mardhiah menekankan pentingnya apel pagi sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Ia mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kekompakan, memperkuat kerjasama, serta mendorong inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga semangat kinerja kita di tahun ini semakin meningkat, guna mewujudkan Kementerian Hukum yang berintegritas, berkinerja, dan melayani," ujar Bahjatul.

Kegiatan apel pagi ini sekaligus menjadi momentum penyegaran semangat bagi seluruh pegawai dalam menghadapi tantangan kerja ke depan, sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Tingkatkan Layanan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Audiensi di Kotabaru



Kotabaru, Humas_Info – Dalam upaya mempererat sinergi dan meningkatkan layanan hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Senin, (28/04). Bertempat di Ruang Rapat Manuntung Kantor Bupati Kotabaru.

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel hadir Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta para JFT dan JFU. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru di hadiri Pj. Sekretaris Daerah, Eka Saprudin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Minggu Basukhi, Kepala Bagian Hukum, Hadlrami, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sonny Tua Halomoan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Gusti A. Wakhid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selamat Riyadi, serta Kepala Dinas PMPTSP, Muhammad Fuad serta jajaran.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengenalan nomenklatur baru Kementerian Hukum, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa tugas utama Kanwil Kemenkum Kalsel adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum di tingkat provinsi. "Kami hadir untuk memperkenalkan tugas Kementerian Hukum yang baru serta mendorong Kabupaten Kotabaru mengoptimalkan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki," ungkap Kepala Kantor Wilayah dalam audiensinya.

Tak hanya fokus pada KI, Kanwil Kemenkum Kalsel juga mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kotabaru dan meningkatkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta jumlah paralegal. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah berharap Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Kotabaru tahun 2025 bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. "Kami berharap Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan capaian IRH demi efektivitas hukum dan investasi daerah, serta peningudalam jumlah Desa Sadar Hukum dan Paralegal" ujarnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi ini. "Kami menyambut baik audiensi ini sebagai langkah membuka wawasan dan memperkuat kerja sama antara Kabupaten Kotabaru dengan Kementerian Hukum," tutur Eka.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menindaklanjuti hasil penilaian IRH serta mendorong perangkat daerah terkait dalam melengkapi data dukung yang diperlukan. "Komitmen kami adalah melakukan tindak lanjut terhadap penilaian IRH dan mengoptimalkan data dukung dari seluruh dinas terkait," tegasnya.

Audiensi ini ditutup dengan diskusi interaktif dan harapan bersama untuk memperkuat kolaborasi di bidang hukum, mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual, serta mendukung pembangunan hukum yang efektif di Kabupaten Kotabaru.

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Audiensi Bersama Pemkab Kotabaru Bahas Pemajuan Hukum Daerah dan Peningkatan IRH



Kotabaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Senin (28/04) bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kotabaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta staf dari masing-masing Bidang dan Bagian di lingkungan Kantor Wilayah.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Kotabaru, hadir mewakili Bupati, Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, beserta para pemangku jabatan di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dalam sambutannya, H. Eka Saprudin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam berbagai bidang pelayanan hukum. "Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kotabaru dan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin, khususnya dalam pemajuan hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengawasan layanan administrasi hukum umum (AHU), serta layanan Kekayaan Intelektual. Kami juga berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di daerah kami," ujar H. Eka Saprudin.

Menyambut sambutan dari Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti turut menyampaikan terima kasih atas penerimaan hangat dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, Nuryanti menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung perkembangan serta pemajuan pelayanan hukum di daerah. "Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya kepastian hukum di daerah, termasuk melalui kolaborasi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah," ujar Nuryanti. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan hukum yang efektif dan akuntabel.

Salah satu fokus utama audiensi kali ini adalah pembahasan mengenai program Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum terkait peningkatan IRH yang berlandaskan pada Permenkumham Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum. Nuryanti menegaskan bahwa pelaksanaan IRH harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko korupsi, serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung implementasi IRH melalui kolaborasi pembinaan yang menjadi bagian penting dalam data dukung penilaian oleh Kementerian PANRB dan Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI.

Di akhir audiensi, baik Kanwil Kemenkum Kalsel maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam rangka memajukan sistem hukum di daerah. Kedua belah pihak berharap agar implementasi program IRH dapat berjalan dengan baik, mengingat pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Kabupaten Kotabaru dapat meraih kemajuan dalam hal pelayanan hukum yang berkelanjutan dan berkualitas.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Optimalisasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotabaru

Kotabaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan potensi Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang digelar pada Senin, 28/04, di Ruang Rapat Manuntung Kantor Bupati Kotabaru.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti menekankan bahwa tahun 2025 telah ditetapkan sebagai tahun tematik untuk Hak Cipta dan Desain Industri. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel mengajak Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual. "Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam promosi Hak Cipta dan Desain Industri di daerah, termasuk di Kotabaru," ujar Kepala Kantor Wilayah dalam paparannya.

Kanwil Kemenkum Kalsel mengidentifikasi beberapa kawasan potensial berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotabaru, antara lain Desa Adat Sampanahan, Pulau Kerumputan, Taman Budaya Kotabaru, serta Kawasan Wisata Mangrove Kotabaru. Lokasi-lokasi ini dinilai memiliki kekayaan budaya, seni, dan alam yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran KI.

"Kami mendorong agar potensi budaya dan wisata ini didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah," tambahnya.

Tidak hanya itu, Kanwil Kemenkum Kalsel juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual. Edukasi tentang manfaat pendaftaran KI, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan, serta pengelolaan KI sebagai aset ekonomi menjadi bagian dari strategi yang ditawarkan.

Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, menyambut baik dorongan tersebut dan menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif ini. "Kami siap bersinergi dan mendukung upaya peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kotabaru, terutama untuk memperkuat identitas budaya dan potensi daerah kami," ungkap Eka.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Kabupaten Kotabaru dapat menjadi salah satu daerah yang aktif dalam perlindungan Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan KI sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.



Menuju Sertifikasi IG Pertama di Kotabaru, Kanwil Kemenkum Kalsel Visitasi ke Desa Tirawan



Kotabaru, KI_Info – Dalam upaya mempercepat perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan visitasi permohonan Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan di Kabupaten Kotabaru, pada Senin (28/04). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Tirawan.

Kegiatan visitasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta JFT dan JFU Kanwil Kemenkum Kalsel. Dari pihak pemerintah daerah, turut hadir Camat Pulau Laut Sigam, Pia Widya Laksmi serta Kepala Desa Tirawan, Sabrani.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan pentingnya mempercepat proses sertifikasi IG untuk produk unggulan daerah. "Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan nyata kami agar Gula Aren Tirawan bisa segera mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis, menjadi produk IG pertama dari Kabupaten Kotabaru," ujarnya.

Ia menambahkan, pada 24 Juni 2025 mendatang akan dilaksanakan pertemuan virtual dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membahas lebih lanjut perkembangan permohonan tersebut. "Kami berharap Gula Aren Tirawan menjadi awal dari lahirnya lebih banyak produk-produk lokal Kotabaru yang terlindungi secara hukum melalui Indikasi Geografis atau skema perlindungan KI lainnya," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menjelaskan bahwa permohonan IG Gula Aren Tirawan telah diajukan sejak empat tahun yang lalu, namun masih terkendala pada penyusunan dokumen deskripsi produk. "Fokus kita saat ini adalah memperbaiki deskripsi, menonjolkan karakteristik khas Gula Aren Tirawan dibandingkan produk sejenis dari daerah lain," terang Meidy.

Setelah sesi diskusi bersama para pengrajin Gula Aren Tirawan mengenai manfaat perlindungan IG, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi produksi gula aren di Desa Tirawan. Dalam peninjauan tersebut, tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel melihat secara langsung proses pembuatan gula aren, untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai keunikan produk yang akan diusulkan sebagai Indikasi Geografis.

Melalui kegiatan visitasi ini, diharapkan Gula Aren Tirawan dapat segera memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis, sekaligus menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lokal lainnya untuk melindungi produk unggulannya melalui Kekayaan Intelektual.

Audiensi Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Pemkab Kotabaru dalam Penyusunan Regulasi Daerah : Dorong Sinergi Harmonisasi



Kotabaru, Humas_Info – Untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Harmonisasi peraturan menjadi fokus utama demi terciptanya regulasi yang berkualitas dan sesuai ketentuan hukum nasional.

Audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru digelar pada Senin (28/04), bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kotabaru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta pelaksana dari masing-masing bidang dan bagian di lingkungan Kantor Wilayah.

Audiensi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru serta jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menyampaikan kembali mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi.

"Proses harmonisasi yang melibatkan kantor wilayah Kementerian Hukum merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Kami ingin memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sejalan dengan ketentuan hukum nasional," tegas Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menambahkan bahwa harmonisasi adalah salah satu kunci untuk mencegah potensi tumpang tindih regulasi.

"Harmonisasi bertujuan agar setiap peraturan yang dihasilkan di daerah tetap berada dalam satu koridor hukum nasional. Kami siap memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada Pemkab Kotabaru sesuai tugas dan fungsi kami," ujar Anton.

Berdasarkan data Kantor Wilayah, hingga bulan April 2025, belum terdapat pengajuan Ranperda maupun Ranperkada dari Kabupaten Kotabaru untuk dilakukan proses harmonisasi di tingkat Kanwil. Diharapkan, melalui audiensi ini, koordinasi dan kolaborasi yang dijalin semakin erat dalam penyusunan regulasi yang efektif dan implementatif.

Sharing Session di Siring Laut: Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Ekraf Kotabaru Maksimalkan Perlindungan KI



Kotabaru, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Sharing Session dengan Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Kotabaru pada Senin malam (28/04) di Panggung Apung Saijaan Siring Laut Kotabaru.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta jajaran JFT dan JFU Kanwil Kemenkum Kalsel. Adapun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru hadir Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Minggu Basukhi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sony Tua Halomon, serta dari 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Kotabaru.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kotabaru, Sony Tua Halomon, menekankan pentingnya pencatatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai kunci pengembangan sektor ekonomi kreatif. Ia menilai perlindungan KI menjadi langkah strategis agar produk-produk kreatif Kotabaru dapat menembus pasar nasional hingga global. Sony juga menyampaikan apresiasi atas dukungan aktif Kanwil Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya layanan KI di kalangan pelaku Ekraf.

Senada dengan itu, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basukhi, menyatakan harapannya agar kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel semakin memperkuat koordinasi di bidang perlindungan Kekayaan Intelektual. Ia juga berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas serta daya saing pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kotabaru.

Dalam sesi sharing, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyampaikan pentingnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk segera mendaftarkan hasil karya mereka agar mendapatkan perlindungan hukum. "Karya kreatif adalah aset berharga. Saya mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tidak ragu mencatatkan dan melindungi Kekayaan Intelektualnya. Kami di Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendampingi dan membantu dalam proses tersebut," ucap Kepala Kantor Wilayah.

Lebih lanjut, ia menambahkan harapan terhadap potensi ekonomi kreatif Kotabaru sangat besar. "Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya melindungi karya, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar global," ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dan para pelaku ekonomi kreatif. Para peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan berbagi pengalaman, sekaligus menerima informasi langsung dari Kementerian Hukum untuk memperkuat kapasitas dalam memanfaatkan layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Tim Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru Terkait Penghapusan Aset



Kotabaru, Humas_Info – Dalam rangka mendukung kelancaran proses usulan penghapusan aset, Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru, pada Senin (28/04/2025).

Bertempat di Ruang Tamu Dinas PUPR Kotabaru, Tim dari Bagian Tata Usaha dan Umum disambut oleh Ibu Nauli Shofiah selaku Kepala Bidang Gedung dan Jasa Konstruksi. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai kebutuhan dokumen pendukung berupa analisa tingkat kerusakan bangunan, yang diperlukan sebagai bagian dari syarat administrasi penghapusan aset gedung milik Kanwil Kemenkum Kalsel.

Menanggapi permohonan tersebut, pihak Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menyatakan siap memberikan dukungan dengan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian langsung ke lokasi bangunan yang dimaksud. Hasil analisa tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses lebih lanjut terkait penghapusan aset.

Koordinasi berlangsung dengan lancar dan aman, sebagai bagian dari sinergi antara instansi pemerintah daerah dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam pengelolaan aset negara yang tertib dan akuntabel.



DJKI Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum di Pasar Mangga Dua untuk Memberantas Produk Palsu



Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran barang palsu, khususnya di pusat perbelanjaan Pasar Mangga Dua. Direktur Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi menegaskan bahwa upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual (KI).

Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, secara rutin melakukan pengawasan, inspeksi mendadak, dan pengecekan lapangan. "Pengawasan terhadap pusat perdagangan seperti Mangga Dua akan terus ditingkatkan," kata Brigjen Pol. Arie 28 April 2025 di Kantor DJKI, Jakarta Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membeli produk bajakan sebagai bagian dari perlindungan KI.

Meski demikian, DJKI menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi peredaran produk palsu. "Keterbatasan ruang lingkup penanganan, minimnya aduan masyarakat, serta rendahnya angka pendaftaran hak cipta menjadi tantangan utama," ujar Brigjen Pol. Arie. Data menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak bajakan di Indonesia masih mencapai 83% pada tahun 2017, tertinggi di Asia Pasifik. Teknologi internet yang kian maju turut memperluas potensi pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Dalam upaya menegakkan hukum, DJKI aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai melalui pembentukan IP Task Force. Task Force ini mengintegrasikan upaya dari Bareskrim Polri, Bea Cukai, serta lembaga lain, sehingga menciptakan sistem penanganan pelanggaran KI yang lebih efektif. "Sebagai contoh, pada tahun 2023, DJKI bersama aparat berhasil menangani 236 kasus pelanggaran KI dan mencegah masuknya lebih dari satu juta produk palsu," tambah Arie.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi, mengungkapkan bahwa dari hasil pengawasan Januari hingga Maret 2025, telah disita barang ilegal senilai Rp15 miliar, sebagian besar berasal dari China dan tidak memenuhi standar nasional.

Menanggapi laporan United States Trade Representative (USTR) yang masih menempatkan Indonesia dalam Priority Watch List, Brigjen Pol. Arie menyampaikan bahwa DJKI tidak tinggal diam. "Kami berkomitmen memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hak kekayaan intelektual," tegasnya.

Meskipun belum keluar dari daftar tersebut, upaya konsisten Indonesia sejak 2004 tetap diakui sebagai langkah positif oleh USTR. Sebagai bagian dari tindak lanjut, DJKI tengah membenahi sistem layanan publiknya, termasuk mempercepat pengembangan sistem pengaduan online yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum KI juga menjadi prioritas, dengan program beasiswa dan pelatihan yang lebih intensif untuk aparatur sipil negara.

DJKI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan KI dengan cara sederhana: membeli produk legal, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mendaftarkan karya cipta yang dimiliki. Pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya melindungi kreator, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pasar yang sehat, dan melindungi konsumen dari produk berbahaya. DJKI berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim kekayaan intelektual yang sehat di Indonesia.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, mendukung penuh langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk palsu, khususnya di pusat perdagangan seperti Pasar Mangga Dua. "Upaya DJKI ini sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kami di daerah juga berkomitmen memperkuat sosialisasi dan layanan pendaftaran KI," ujar Nuryanti, Selasa (29/04/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan produk palsu membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dengan menghargai dan menggunakan produk legal.

Kick Off Meeting Penyusunan Renstra 2025-2029, Kanwil Kalsel Suarakan Kebutuhan Daerah



Kotabaru, Humas_Info - Pada Selasa, (29/04) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Kick Off Meeting yang diselenggarakan dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 serta Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka dan juga pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel secara terpisah di kabtor wilayah.

Dalam laporan pembukaannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan bahwa penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga untuk periode 2025-2029 akan dilaksanakan dengan mengikuti timeline yang sudah ditetapkan. "Kementerian Hukum turut berperan dalam mewujudkan Asta Cita baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu konsep Rumah Strategis Kementerian Hukum 2024-2029 agar memudahkan dalam memahami fungsi dari Renstra yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang membuka kegiatan ini menegaskan pentingnya penyusunan Renstra yang tidak hanya berfokus pada unit pusat, tetapi juga menyentuh elemen-elemen strategis di unit kerja. "Saya berharap dalam penyusunan Renstra kali ini, kita dapat mengadopsi pembangunan tematik yang relevan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Renstra bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi instrumen penting yang memerlukan masukan dari seluruh elemen untuk memastikan bahwa capaian kita bisa sesuai dengan target," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel dalam sesi audiensi dengan Wakil Menteri, Edward OS Hiariej, Sekretaris Jenderal, Nico Afinta dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga mengungkapkan beberapa poin penting terkait penyusunan Renstra. "Penguatan Tugas dan fungsi terutama di daerah sangat penting, seperti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena masih ada Pemerintah Daerah yang belum melakukan harmonisasi Perda dengan Kementerian Hukum," ujar Kepala Kantor Wilayah.

Nuryanti Widyastuti juga menyampaikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital yang bisa lebih disesuaikan dengan daerah sehingga bisa dilakukan monitoring per daerah seperti data permohonan KI dana data terkait jumlah notaris dan beban kerjanya per wilayah, "Agar Indikator Kinerja Kantor Wilayah dapat sejalan dengan target nasional namun tetap memperhatikan kearifan lokal yang juga memiliki Road Map masing-masing" tambahnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses penyusunan Renstra Kementerian Hukum 2025-2029 dapat berjalan dengan baik dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang ada di setiap wilayah, sekaligus mendukung pencapaian tujuan besar Kementerian Hukum dalam pembangunan nasional.

Kunjungan Kerja Pemkab Tanah Laut Bahas Tindak Lanjut MoU dan Pengajuan Harmonisasi Raperda ke Kemenkum Kalsel

Banjarmasin, PPPH_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Selasa pagi (29/04/2025). Kunjungan ini dipimpin oleh Taufikurrahman, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, dan diterima langsung oleh Bahjatul Mardhiah bersama jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil.

Pertemuan ini membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. MoU tersebut mencakup kerja sama strategis dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga mengajukan permohonan harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni: Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, dalam waktu dekat direncanakan pula pengajuan harmonisasi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut, yang saat ini sedang dalam proses penyiapan surat permohonan dan kelengkapan dokumen.

Melalui kerja sama ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan terus memperkuat peran pembinaan dan pengawalan pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta memberikan kepastian hukum yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.



Sekretariat DPRD Kab. Balangan Lakukan Audiensi dan Inisiasi MoU dengan Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, PPPH_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima audiensi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan pada Selasa siang (29/4). Kegiatan ini dipimpin oleh Hasan Nor Arifin, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dan diterima langsung oleh dua perancang peraturan perundang-undangan Kanwil, yakni Eryck Yulianto dan Bahjatul Mardhiah, masing-masing selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam mempererat sinergi kelembagaan, khususnya dalam bidang hukum. Dalam pertemuan tersebut, Sekretariat DPRD Balangan menginisiasi rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. MoU ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak, antara lain dalam hal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), penyusunan instrumen hukum lainnya, dokumentasi, serta sosialisasi produk hukum.

Selain membahas kerja sama kelembagaan, Sekretariat DPRD Balangan juga menyerahkan tiga Raperda yang telah disempurnakan sebagai syarat untuk memperoleh surat selesai harmonisasi. Ketiga Raperda tersebut meliputi:

- Raperda tentang Perlindungan Perkebunan Rakyat,
- Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan
- Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan kerja sama antara DPRD Kabupaten Balangan dan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan semakin solid dan produktif, serta mampu mendorong terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat Balangan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperbup Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pasien Kurang Mampu di Kab. HSU



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Dana Pendamping untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Kurang Mampu dan Pasien Khusus Terkendala Pembiayaan Kesehatan pada Selasa (29/04/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi pembentukan produk hukum daerah agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Proses harmonisasi ini turut melibatkan perancang perundang-undangan Kantor Wilayah sebagai tenaga teknis ahli yang memberikan pendampingan substantif dan teknis dalam penyusunan Raperbup yang dipimpin langsung oleh Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya.

Jajaran perancang turut memberikan telaah mendalam terhadap materi muatan, dasar hukum, serta teknik penyusunan norma, untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga operasional dan implementatif. Raperbup ini sendiri bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi RSUD Pambalah Batung dalam mengelola Dana Pendamping yang ditujukan untuk menanggung pembiayaan layanan kesehatan bagi pasien kurang mampu, pasien khusus seperti tokoh masyarakat, ulama, seniman daerah, dan atlet berprestasi, serta pasien yang dinyatakan tidak layak bayar oleh BPJS.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui regulasi ini menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif. Dana yang dialokasikan akan digunakan untuk pembiayaan rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut, termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medis, hingga akomodasi ICU sesuai kebutuhan medis dan indikasi yang berlaku.

Harmonisasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan melalui pembentukan tim verifikasi dan tim anti-fraud di tingkat RSUD.

Dengan terselesaikannya proses harmonisasi ini, diharapkan Raperbup dapat segera ditetapkan dan diundangkan sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Hulu Sungai Utara, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas dan membutuhkan bantuan pembiayaan layanan kesehatan.

Sinergi untuk Inovasi: Bappeda Tanah Bumbu dan Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Peningkatan Permohonan KI



Tanah Bumbu, KI_Info - Dalam rangka mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa, (29/04).

Koordinasi yang berlangsung di kantor Bappeda Litbang Tanah Bumbu ini menjadi bagian dari implementasi Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025, yang dicanangkan secara nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di berbagai sektor masyarakat.

Hadir mewakili Kantor Wilayah dalam kegiatan ini antara lain Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi beserta JFT/JFU bidang KI. Sementara dari pihak Bappeda Litbang Tanah Bumbu turut hadir Sekretaris Bappeda Litbang Romatua S. Simanjuntak, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Amidah Sri Filia Irriati, Kabid Penelitian dan Pengembangan Dyah Hartati Dewi, serta JF Prakom, Ugi Mukti.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kantor Wilayah menyampaikan sosialisasi mengenai kebijakan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di wilayah Tanah Bumbu. Selain itu, dibahas pula pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan atas hasil karya dan inovasi masyarakat, baik individu maupun kelompok usaha.

Kegiatan ini juga menghasilkan kesepakatan awal untuk menjajaki kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dengan Bappeda Litbang Tanah Bumbu dalam mendorong peningkatan permohonan KI melalui kegiatan yang lebih terstruktur, seperti sosialisasi, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku usaha, UMKM, dan komunitas kreatif di daerah.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi kedua belah pihak dapat terus diperkuat guna menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di Tanah Bumbu.



Kanwil Kemenkum Kalsel Tinjau Aset di Desa Teluk Mesjid Kotabaru, Optimalkan Pengelolaan BMN



Kotabaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui pelaksana pada Bagian Tata Usaha dan Umum melakukan peninjauan aset milik Kemenkum yang terletak di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada Selasa, 29 April 2025.

Peninjauan dilakukan terhadap aset berupa bangunan yang berada tepat di seberang Kantor Kepala Desa Teluk Mesjid. Dalam kunjungan tersebut, JFU Bagian TU dan Umum menyampaikan rencana penghapusan aset bangunan kepada Kepala Desa Teluk Mesjid.

Sebagai bagian dari proses tersebut, bangunan ditinjau langsung bersama Kepala Desa, dan diinformasikan bahwa akan ada kunjungan tim penilai dari Dinas PUPR untuk menganalisa tingkat kerusakan bangunan yang dimaksud.

Kepala Desa Teluk Mesjid mengungkapkan harapannya agar bangunan tersebut, apabila telah resmi dihapuskan dari daftar aset Kemenkum, dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas masyarakat desa.

Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum guna membahas kemungkinan pemanfaatan aset oleh masyarakat pasca proses penghapusan aset rampung.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya tertib pengelolaan aset negara serta keterlibatan Kemenkum dalam mendukung pengembangan potensi lokal melalui pemanfaatan aset secara produktif dan tepat guna.



Perkuat Pengawasan Ormas, Kemenkum Kalsel Lakukan Koordinasi dengan Kesbangpol Barito Kuala



Barito Kuala, AHU_Info - Dalam upaya memperkuat sinergi pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Kuala, Selasa (29/04/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Kesbangpol Barito Kuala ini dihadiri oleh perwakilan dari kedua instansi. Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait keberadaan dan pengelolaan ormas di wilayah kabupaten.

Muhammad Hatta, perwakilan Tim Bidang Pelayanan AHU, membuka kegiatan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pengawasan ormas, terutama yang telah berbadan hukum, agar lebih efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat mekanisme pembinaan ormas di lapangan dan menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ikhwan Ridany dari Badan Kesbangpol Barito Kuala memaparkan kondisi terkini data ormas di wilayahnya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, tercatat sebanyak 39 ormas terdaftar di Barito Kuala. Namun demikian, hanya 25 ormas yang tercatat masih aktif secara administratif dan fungsional.

Menanggapi hal tersebut, Novita Sari dari Tim Pelayanan AHU turut memberikan penjelasan mengenai aspek legalitas badan hukum ormas. Ia menyampaikan informasi seputar tata cara pendirian ormas berbadan hukum, perubahan anggaran dasar, hingga proses pembubarannya sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Hukum.

Diskusi juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi kedua belah pihak, mulai dari kurangnya pelaporan kegiatan ormas, ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah, hingga terbatasnya sumber daya dalam proses pemantauan langsung di lapangan. Meski demikian, baik Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan maupun Kesbangpol Barito Kuala sepakat untuk terus mempererat koordinasi dan mencari solusi bersama demi menciptakan pengelolaan ormas yang lebih tertib dan profesional.

Melalui koordinasi ini, diharapkan peran strategis ormas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat semakin optimal, sekaligus memastikan aktivitas mereka berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku.

Dorong Ekonomi Kreatif, Kanwil Kemenkum Kalsel Identifikasi Produk Unggulan KI Tanah Bumbu



Tanah Bumbu, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) terus berupaya mendorong peningkatan kesadaran dan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri) Kabupaten Tanah Bumbu, yang dilaksanakan pada Selasa (29/4) di Kantor Diskumdagri Tanah Bumbu.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama tim dari Kantor Wilayah, dan disambut oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Rhani Patih, serta Kepala Bidang Perindustrian, Sri Minarni.

Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Program tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual melalui peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, dalam mendaftarkan karya dan produk unggulan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam pentingnya mendorong pelaku usaha untuk memahami nilai penting dari perlindungan kekayaan intelektual serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran hak cipta maupun desain industri. Selain itu, disampaikan pula penjelasan mengenai kriteria produk unggulan kekayaan intelektual yang layak dikembangkan dan dilindungi. Upaya identifikasi terhadap potensi produk lokal yang memiliki karakteristik khas dan nilai ekonomi juga turut dilakukan sebagai bagian dari pembinaan lanjutan.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

“Kami berharap Diskumdagri dapat menjadi mitra aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kekayaan intelektual kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan industri kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing produk lokal Kabupaten Tanah Bumbu di tingkat regional maupun nasional.

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Beragendakan Penyerahan Rekomendasi LKPJ dan Pembukaan Masa Sidang Kedua



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menghadiri kegiatan Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/4), dengan agenda utama penyampaian hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 serta penutupan dan pembukaan masa persidangan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta 34 anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta instansi vertikal. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang mewakili Gubernur untuk menerima rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun anggaran sebelumnya.

Pada kegiatan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Danang Nugroho, juga turut hadir dalam rapat ini.

Agenda pertama dalam rapat tersebut adalah penyampaian hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Kartoyo, dan secara simbolis diserahkan kepada Wakil Gubernur oleh Ketua DPRD. Selanjutnya, rapat memasuki agenda kedua yakni penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025 dan pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD yang telah meluangkan waktu untuk membahas dan menyusun rekomendasi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan ke depan.

Rapat Paripurna berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan sinergi positif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan



Dukung Perencanaan Pembangunan di HST, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Lakukan Harmonisasi Raperbup RKPD HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum telah melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (30/04/2025) dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana serta dihadiri oleh perangkat daerah teknis dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Harmonisasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa rancangan regulasi daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses ini juga bertujuan untuk menjaga keterpaduan dokumen perencanaan daerah dengan arah pembangunan nasional serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam perubahan yang diharmonisasikan, terdapat penyesuaian pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024, yang mengatur sistematika RKPD Tahun 2025. Dokumen tersebut kini tersusun dalam enam bab, meliputi: Pendahuluan, Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Penutup. Lampiran yang memuat substansi utama rencana kerja juga diperbaharui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Tim dari Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum memberikan masukan teknis serta legal drafting untuk memastikan agar seluruh materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pembangunan, serta selaras dengan kerangka hukum nasional.



Empat Rancangan Regulasi Pemkab HST Telah Rampung Diharmonisasi Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah menyelesaikan proses harmonisasi terhadap empat rancangan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Proses ini ditutup dengan kegiatan serah terima dokumen hasil harmonisasi yang berlangsung di Aula Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (30/04/2025).

Empat rancangan regulasi yang dimaksud terdiri dari dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Adapun regulasi tersebut meliputi Ranperda tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Ranperbup tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kurang Salur dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kurang Salur untuk Setiap Desa di Kabupaten HST Tahun Anggaran 2025, Ranperbup tentang Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Daerah Tahun 2025-2045, serta Ranperbup tentang Inovasi Daerah.

Serah terima rancangan regulasi dilakukan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhiddin/ Dalam keterangannya, Anton menegaskan bahwa pentingnya proses harmonisasi sebagai instrumen untuk menjaga keselarasan substansi dan legalitas produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Muhiddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel atas pendampingan dan fasilitasi yang diberikan selama proses harmonisasi berlangsung. Ia berharap keempat regulasi tersebut dapat segera ditetapkan agar dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, inovasi daerah, serta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id